

**RENCANA KERJA
(RENJA)
2013**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan siklus perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun oleh masing-masing unit organisasi/lembaga teknis daerah yang memuat tentang program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Dalam penyusunannya, Renja SKPD harus mengacu kepada rancangan awal RKPd dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Rancangan awal RKPd sebagaimana dimaksud menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPd. Sedangkan Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPd yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

Adapun tahapan penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut :

1. persiapan penyusunan Renja SKPD;
2. penyusunan rancangan Renja SKPD;
3. pelaksanaan forum SKPD;
4. penetapan Renja SKPD.

Rancangan Renja SKPD dibawa ke dalam forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk diselaraskan dengan Rancangan RKPd mengenai program prioritas yang akan dilaksanakan. Rancangan Renja SKPD hasil dari forum SKPD/Forum Gabungan SKPD kemudian dibawa ke tingkat Musrenbang RKPd untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh unsur stakeholders pembangunan untuk kemudian dilegalisasi menjadi Renja SKPD.

Renja SKPD yang telah disahkan ini menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rencana Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) tingkat kabupaten, sampai akhirnya difinalisasi menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah ini kemudian dituangkan kedalam penetapan kinerja mengenai target yang harus dicapai oleh masing-masing SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja SKPD tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundangan yang ada. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011-2016;
15. Keputusan Kepala Bappeda nomor 910/kep.12-Bapp tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renja Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 adalah untuk memberikan gambaran tentang Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN RENJA

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2011 seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda tahun 2011 secara keseluruhan dinilai sangat baik yaitu 98,46% meskipun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dari target kinerja yang telah ditentukan sehingga secara otomatis berimbas pula terhadap pencapaian sasaran strategik.

Adapun sasaran strategik yang tidak memenuhi target kinerja antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya data/informasi yang up to date;
2. Terwujudnya pola kerjasama pembangunan yang terarah dan terukur;
3. Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan; dan
4. Tersedianya data/informasi/statistik daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Sementara sasaran strategik yang telah memenuhi target kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif;
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Meningkatnya peran dan fungsi Bappeda;
5. Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi;
6. Terkoordinasinya perencanaan dan penanggulangan serta pengentasan kemiskinan daerah;
7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui peningkatan SDM dan pengelolaan SDA secara optimal dan merata;
8. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas aparatur perencana;

9. Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan; dan
10. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi di Kabupaten Pandeglang.

Dari sekitar 4 (empat) sasaran strategik yang tidak memenuhi target kinerja hanya terdapat 3 (tiga) sasaran yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan 1 (satu) sasaran strategik yang mengalami rasionalisasi kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan 100% yaitu sasaran Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan. Didalam sasaran Tersedianya data dan dokumen perencanaan pembangunan terdapat 24 kegiatan dan hanya satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan BinteK sikip dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaporan.

Adanya sasaran yang tidak memenuhi target kinerja bukan berarti Bappeda tidak memiliki komitmen terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, namun hal ini berkaitan dengan adanya rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berimbas kepada rasionalisasi anggaran SKPD secara keseluruhan, sehingga guna mendukung kebijakan daerah tersebut, Bappeda menghilangkan/mengurangi anggaran beberapa kegiatan yang secara prinsip tidak berpengaruh besar terhadap pencapaian visi dan misi Renstra Bappeda.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang berikut anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2011 SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
BAPPEDA	3,363,471,950	3,311,787,237	98.46
BELANJA LANGSUNG	3,363,471,950	3,311,787,237	98.46
Program Pelayanan Administrasi Kantor	428,466,000	422,545,627	98.62
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,878,750	45,789,105	95.64
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	36,500,000	36,357,272	99.61
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	16,000,000	16,000,000	100.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	5,000,000	100.00

Penyediaan Peralatan Dan Kelengkapan Kantor	90,971,250	89,466,250	98.35
Penyediaan Makanan dan Minuman	40,000,000	39,960,000	99.90
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,000,000	98,650,000	98.65
Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian Dan Kearsipan	30,500,000	30,500,000	100.00
Layanan Administrasi Kantor	50,000,000	49,207,000	98.41
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	11,616,000	11,616,000	100.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	291,500,000	288,688,000	99.04
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	281,500,000	278,688,000	99.00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,000,000	100.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000	5,000,000	100.00
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan	5,000,000	5,000,000	100.00
Pengelolaan Aset SKPD	5,000,000	5,000,000	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan Dan Evaluasi	40,000,000	39,015,000	97.54
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	10,000,000	10,000,000	100.00
Penyusunan Dokumen Pelaporan Dan Evaluasi SKPD	15,000,000	14,015,000	93.43
Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP	15,000,000	15,000,000	100
Program Pengembangan Data/ Informasi	-	-	-
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Website	-	-	-
Program Kerjasama Pembangunan	-	-	-
Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan (SEKBER BAPPEDA)	-	-	-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	110,000,000	96,792,500	87.99
Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Daerah Tertinggal (TKPPDT)	50,000,000	49,450,000	98.90
Penunjang Kegiatan KPDT	60,000,000	47,342,500	78.90
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	99,300,000	93,204,400	93.86
Penunjang P2KP Program Penanggulangan Kemiskinan	99,300,000	93,204,400	93.86
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	130,000,000	129,345,000	99.50
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	40,000,000	39,600,000	99.00

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	90,000,000	89,745,000	99.72
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	880,030,950	875,102,350	99.44
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	79,010,000	78,752,500	99.67
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	217,800,000	215,874,500	99.12
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	85,000,000	83,260,000	97.95
Kegiatan Asistensi Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD	93,000,000	92,900,000	99.89
Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/PPAS Dan KUPA/PPASP	142,220,950	142,216,750	100.00
Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang	-	-	-
Penyusunan Dan Penetapan RPJM Kab. Pandeglang TA. 2011-2015	117,000,000	116,113,600	99.24
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Program Penganggaran Penelitian Pengembangan Dan Statistik (P4S)	96,000,000	96,000,000	100.00
Sinkronisasi Program Pengembangan Nasional Dan Daerah	50,000,000	49,985,000	99.97
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	130,000,000	125,799,500	96.77
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	80,000,000	76,219,500	95.27
Pengendalian Dan Evaluasi Bidang ekonomi	50,000,000	49,580,000	99.16
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	335,000,000	331,824,000	99.05
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	135,000,000	134,360,000	99.53
Pengendalian Dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya	80,000,000	79,917,000	99.90
Penunjang Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPA)	65,000,000	63,347,000	97.46
Kelembagaan Kabupaten Sehat	55,000,000	54,200,000	98.55
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan sumber Daya Alam	550,550,000	548,252,000	99.58
Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana	65,550,000	65,080,000	99.28
Pengendalian Dan evaluasi Bidang fisik Dan Prasarana	50,000,000	49,417,000	98.83
Koordinasi Pokja Penataan Ruang BKPRD	95,000,000	94,400,000	99.37
Penyusunan Buku Puth Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	75,000,000	74,775,000	99.7
Perencanaan Perumahan Dan Pemukiman	50,000,000	49,790,000	99.58
POKJA AMPL/PPSP	50,000,000	49,790,000	99.58
Koordinasi Irigasi Partisipatif	165,000,000	165,000,000	100

Program Penyusunan Dokumen Pelaporan Perencanaan Kabupaten	175,000,000	174,868,220	99.92
Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Pandeglang	55,000,000	55,000,000	100.00
Koordinasi Penyusunan SAKIP	120,000,000	119,868,220	99.89
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	52,625,000	45,480,000	86.42
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	52,625,000	45,480,000	86.42
Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	126,000,000	125,870,640	99.90
Penyusunan data statistik Daerah	126,000,000	125,870,640	99.90
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan	-	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Pandeglang tidak secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik, melainkan hanya memberikan kerangka kerja kepada seluruh SKPD yang secara langsung melayani masyarakat. Atau dengan kata lain Bappeda berada pada tataran perencanaan yang akan memberikan arahan dan kendali terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD lainnya menyangkut perencanaan pembangunan daerah secara umum sehingga selaras dan konsisten dengan arah kebijakan daerah.

Secara umum kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (SP3D) yang memuat ketentuan umum perencanaan dan penganggaran di daerah. Pada Perda SP3D inilah peran dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana dapat terlihat dengan jelas dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai kepada evaluasi terhadap keseluruhan proses pembangunan di daerah.

Sebagai lembaga perencana, Bappeda memberikan fasilitas terhadap seluruh SKPD dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi maupun nasional baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sebagai lembaga pengendali, Bappeda memberikan supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di SKPD untuk memastikan kesesuaian antara

perencanaan dan pelaksanaannya sehingga tidak keluar dari ketentuan kebijakan umum daerah. Dan hasil dari perencanaan dan pengendalian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Bappeda untuk melaksanakan perencanaan tahun berikutnya.

Khusus untuk perencanaan tahunan, sesuai dengan Perda SP3D dan turunan dari Perda SP3D yaitu Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD, Bappeda Kabupaten Pandeglang secara intensif memberikan pelayanan optimal dalam rangka penyusunan rencana kerja tiap-tiap SKPD dari mulai Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang RKPD, Penyusunan RKUA/RPPAS sampai kepada Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang akan dijadikan dasar penyusunan APBD.

Pada penyusunan rencana tahunan ini, Bappeda memberikan assistensi dan verifikasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tiap-tiap SKPD agar terjadi kesesuaian ataupun sinkronisasi dengan prioritas daerah guna mewujudkan visi dan misi kabupaten. Langkah penanganan yang dilakukan Bappeda sudah jelas dari mulai jadwal penyusunan Renja SKPD, koordinasi penanganan SKPD sesuai dengan bidang koordinasi di Bappeda, sampai kepada penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran yang merupakan tahapan akhir proses perencanaan dan penganggaran sebelum disahkan menjadi APBD.

Meskipun pada dasarnya memang Bappeda belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun memang pada pelaksanaannya prosedur perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya tinggal bagaimana kemudian hal tersebut mendapatkan legalitasnya guna mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berjalan lebih baik dimasa yang akan datang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Pandeglang berusaha untuk tetap konsisten terhadap apa yang menjadi kebijakan daerah secara umum. Artinya dalam pengelolaan manajemen perencanaan berusaha seoptimal mungkin mengikuti aturan perundangan yang berlaku diselaraskan dengan apa yang menjadi kebijakan daerah atau dalam hal ini visi dan misi kepala daerah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun harus diakui bahwa pemahaman SKPD terhadap proses perencanaan yang dilakukan Bappeda dinilai sangat relatif. Akibatnya terkadang apa yang telah direncanakan masih jauh dari harapan dan hal ini tentu menjadi perhatian utama agar bagaimana kedepan hal tersebut dapat berbanding lurus. Lemahnya pengendalian yang dilakukan Bappeda merupakan kondisi kekinian yang harus diperbaiki kedepan agar target kinerja pada masing-masing SKPD dengan realisasinya tidak terdapat ketimpangan/gap yang terlalu besar.

Disamping hal tersebut diatas kendala lainnya yang dihadapi oleh Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah adalah bargaining position pada proses politik yang justru melemahkan proses perencanaan yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga target-target kinerja tertentu yang dinilai sangat strategis tidak dapat tercapai dengan baik. Namun ini tentu merupakan konsekuensi dari demokratisasi yang sedang dialami, dimana dinamikanya berjalan sangat cepat sementara disisi lain proses perencanaan tetap berpijak kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Hal lainnya yang menjadi kendala dalam perencanaan pembangunan daerah adalah anggaran yang sangat minim, mengakibatkan beberapa program atau kegiatan yang menunjang program atau kegiatan strategis tidak dapat dilaksanakan. Kemudian masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan minimnya sarana dan sarana penunjang kegiatan adalah beberapa kendala yang harus segera dibenahi agar perencanaan dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian berbagai kendala yang dihadapi tersebut tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Bappeda. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki Bappeda berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, meskipun disisi lain pengendalian program yang dilakukan masih sangat lemah. Dalam rencana

strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 fungsi pengendalian program yang dilakukan Bappeda akan dipertegas kembali dan diposisikan pada level yang strategis guna menjamin keberhasilan perencanaan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 mengusung tema "Penguatan Infrastruktur dan Suparastuktur Wilayah Guna Mendukung Sektor Pertanian dan Pariwisata". Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah;
2. Pengentasan desa tertinggal;
3. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sektor pertanian dan pariwisata;
4. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan melibatkan investor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak;
6. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin/tidak mampu;
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah;
8. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penyelesaiannya dengan penataan ruang daerah;

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, Bappeda Kabupaten Pandeglang mengambil peranan sebagai koordinator perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD agar sejalan dan konsisten terhadap kebijakan daerah. Program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi koordinasi perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta bidang program, penganggaran, penelitian dan pengembangan statistik. Kemudian program dan

kegiatan utama lainnya adalah pengendalian dan evaluasi dari masing-masing bidang terhadap SKPD yang berada dilingkup koordinasinya termasuk didalamnya survey lapangan untuk melihat progress pembangunan fisik yang dilaksanakan.

Dengan dilaksanakannya koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD guna menunjang prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD telah tepat sasaran disamping juga pengendalian yang dilakukan akan berupaya menjaga konsistensi program dan kegiatan sehingga pada akhir periode RPJMD, apa yang menjadi visi, misi dan kebijakan daerah dapat tercapai dengan baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum pembangunan nasional sesuai dengan dokumen RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. penanggulangan kemiskinan;
5. ketahanan pangan;

6. infrastruktur;
7. iklim investasi dan usaha;
8. energi;
9. lingkungan hidup dan bencana;
10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kabupaten Pandeglang berupaya seoptimal mungkin mensinergikan dengan apa yang menjadi arah kebijakan dan prioritas daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk Rencana Kerja tahun 2013 Bappeda Kabupaten Pandeglang memiliki 5 (lima) sasaran strategik yang akan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang 2011-2016, diantaranya adalah :

1. Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Meningkatnya investasi daerah;
4. Meningkatnya intensitas penelitian dan pengembangan serta up dating data statistik daerah dalam menunjang perencanaan pembangunan daerah; dan
5. Meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan dalam menjalankan perencanaan pembangunan daerah.

Dari kelima sasaran tersebut diatas, Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pandeglang tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Renstra Bappeda melalui perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terarah dan terpadu serta konsisten ditunjang oleh data statistik dan informasi yang memadai bagi proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

2.3. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan rencana kerjanya, Bappeda Kabupaten Pandeglang melaksanakan 3 urusan, 10 program dan 48 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran dari APBD Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 4.571.548.883. Usulan alokasi anggaran sebesar 4,5 milyar rupiah untuk Bappeda sebagian besar digunakan untuk koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan program/kegiatan yang secara langsung mendukung tercapainya visi dan misi RPJMD seperti kegiatan Koordinasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Kegiatan
Urusan Perencanaan Pembangunan	
Program Pelayanan Administrasi Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan
	Layanan Administrasi Kantor
	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
	Pengadaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan Aset SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
	Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/ PPAS dan KUPA/PPASP
	Asistensi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) kabupaten pandeglang
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
	Kegiatan koordinasi Penyusunan LAKIP
	Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
	Pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi
	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosbud
	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik dan prasarana
	Pengendalian dan Program Evaluasi Pembangunan Kabupaten
	Koordinasi Penanganan Desa Tertinggal (KPDT)
	Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional dan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparat Perencana	Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana
	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab, Pandeglang

Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial Budaya
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Program Penganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S
	Koordinasi irigasi partisipatif dan sanitasi
	Perencanaan perumahan dan permukiman
	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
	Koordinasi KEK Pariwisata
	Penunjang Kegiatan KPDT
	Penunjang P2KP Program Penanggulangan Kemiskinan
	Koordinasi Pokja Penataan Ruang BKPRD
	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)
	Koordinasi Penunjang kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)
	Koordinasi dan Evaluasi Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Urusan Penanaman Modal	
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi
Urusan Statistik	
Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah
	Pemeliharaan Jaringan Website
Program Penelitian dan pengembangan informasi IPTEK dan Pembangunan	Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah
	Grand Design Pengembangan Buffer Zone TNUK
	Studi Kelayakan AMP

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja Bappeda Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 diarahkan pada upaya pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Kebijakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang 2011-2016. Visi Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pandeglang 2011-2016 adalah Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai Koordinator Perencanaan Pembangunan yang Visioner, Inovatif, Aspiratif dan Pengendali Program Pembangunan yang Handal. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bappeda Kabupaten Pandeglang seoptimal mungkin untuk mengawal jalannya perencanaan pembangunan daerah sesuai arah kebijakan daerah seperti yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Untuk itu program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2013 sebagian besar diarahkan pada lingkup koordinasi masing-masing bidang dan pengendalian terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Dua hal ini (koordinasi perencanaan dan pengendalian) yang menjadi arus utama program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda sebagai arahan terhadap semua SKPD dalam menjalankan program dan kegiatannya sehingga selaras dengan apa yang menjadi kebijakan daerah.

Pandeglang, Maret 2012
Kepala Bappeda
Kabupaten Pandeglang

Drs. H. Aah Wahid Maulany, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 195609071982021001

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013
Dan Prakiraan Maju Tahun 2014
Kabupaten Pandeglang**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2014		Instansi Pusat/ SKPD Provinsi Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	BAPPEDA				4,571,548,883			4,596,161,359	
1.06.01	Perencanaan Pembangunan				4,086,548,883			4,261,161,359	
1.06.01.1	Program Pelayanan Administrasi Kantor				662,452,883			696,575,627	
1.06.01.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Sarana Jasa Komunikasi Air, Listrik, dan Internet	Bappeda Kabupaten Pandeglang	12 Bulan	61,950,000		12 Bulan	65,047,500	
1.06.01.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan	Bappeda Kabupaten Pandeglang	16 Unit	80,000,000		16 Unit	85,000,000	
1.06.01.1.06.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Rekonsiliasi Bulanan, Laporan Realisasi Anggaran Persemester, Laporan Penjabaran APBD, Laporan Akhir Tahun, Prognosis dan Laporan Pendukung Lainnya	Bappeda Kabupaten Pandeglang	12 Dokumen LRA	74,550,000		12 Dokumen LRA	78,277,500	
1.06.01.1.06.01.01.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kabupaten Pandeglang	90%	70,245,000		90%	73,757,250	
1.06.01.1.06.01.01.22	Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Kearsipan	Bappeda Kabupaten Pandeglang	17 Dokumen Laporan	41,987,400		17 Dokumen Laporan	44,086,770	
1.06.01.1.06.01.01.24	Layanan Administrasi Kantor	Tersedianya jasa Laporan Operasional Kegiatan Langsung Dasar	Bappeda Kabupaten Pandeglang	90%	211,365,683		90%	221,933,967	
1.06.01.1.06.01.01.31	Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang	Terpenuhinya Pembayaran Honor TTK	Bappeda Kabupaten Pandeglang	4 orang	12,196,800		4 orang	12,806,640	
1.06.01.1.06.01.01.45	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Bappeda Kabupaten Pandeglang	36 item	110,158,000		36 item	115,666,000	
1.06.01.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				106,250,000			71,662,500	
1.06.01.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 Unit Kendaraan Roda Empat	38,000,000		-	-	
1.06.01.1.06.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	Bappeda Kabupaten Pandeglang	17 Ruang	68,250,000		17 Ruang	71,662,500	
1.06.01.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				15,750,000			16,537,500	
1.06.01.1.06.01.06.07	Pengelolaan Aset SKPD	Tersedianya uku Inventaris Aset SKPD, rencana kebutuhan barang unit (RKB), KIR, Berita acara serah terima barang, laporan sementara dan tahunan aset	Bappeda Kabupaten Pandeglang	7 Dokumen Laporan	15,750,000		7 Dokumen Laporan	16,537,500	
1.06.01.1.06.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi				53,163,000			58,569,432	
1.06.01.1.06.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya RKA/DPA 2014, RKAP/ DPAP 2013, RKT 2014, TAPKIN 2013, RENJA 2014, IKU 2014	Bappeda Kabupaten Pandeglang	8 Dokumen	36,052,500		8 Dokumen	39,747,882	
1.06.01.1.06.01.08.02	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip, Laporan Tahunan Bappeda, LPPD, Laporan Bulanan Bappeda, Laporan Triwulan Bappeda	Bappeda Kabupaten Pandeglang	5 Dokumen	17,110,500		5 Dokumen	18,821,550	
1.06.01.1.06.01.28	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1,318,933,000			1,432,816,300	
1.06.01.1.06.01.28.01	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Terlaksananya musrenbang RKP untuk perencanaan pembangunan daerah kab. Pandeglang tahun 2014 yang diikuti oleh SKPD dan Stakeholder	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	250,000,000		1 Dokumen	270,000,000	
1.06.01.1.06.01.28.02	Kegiatan Penyusunan Dokumen KUA/ PPAS dan KUPA/PPASP	Tersedianya Dokumen KUA/PPAS TA. 2013 dan KUPA/ PPASP 2014 kab. Pandeglang	Bappeda Kabupaten Pandeglang	4 Dokumen	130,000,000		4 Dokumen	150,000,000	
1.06.01.1.06.01.28.04	Asistensi dan penajaman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) kabupaten pandeglang	Tersusunnya dokumen RKA tahun anggaran 2014 berbasis kinerja	Bappeda Kabupaten Pandeglang	2 Kegiatan	170,000,000		2 Kegiatan	180,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2014		Instansi Pusat/ SKPD Provinsi Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 1 06 01 28 05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen LKPJ Kepala daerah tahun 2013	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	70,000,000		1 Dokumen	80,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 06	Kegiatan koordinasi Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP kab. Pandeglang Tahun 2012	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	70,000,000		1 Dokumen	80,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 09	Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Terlaksananya penyusunan dokumen IKU Kab. Pandeglang tahun 2014	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	40,000,000		1 Dokumen	50,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 10	Pengendalian dan evaluasi bidang ekonomi	terlaksananya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan SKPD lingkup ekonomi	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 x Rapat koordinasi	75,000,000		3 x Rapat koordinasi	75,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 11	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosbud	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan SKPD lingkup bidang sosbud	Bappeda Kabupaten Pandeglang	8 rapat/dokumen	130,200,000		8 rapat/dokumen	136,710,000	
1 06 01 1 06 01 28 12	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Fisik dan prasarana	tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi bidang fisik dan prasarana	Bappeda kabupaten pandeglang	3 Dokumen	120,000,000		3 Dokumen	125,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 16	Pengendalian dan Program Evaluasi Pembangunan Kabupaten	Tersusunnya Dokumen Pelaporan program dan kegiatan Pembangunan Kabupaten Pandeglang TA. 2012	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 Dokumen	73,733,000		3 Dokumen	81,106,300	
1 06 01 1 06 01 28 18	Koordinasi Penanganan Desa Tertinggal (KPDT)	Terselenggaranya koordinasi, Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanganan desa tertinggal	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 x Rapat Koordinasi	100,000,000		3 x Rapat Koordinasi	100,000,000	
1 06 01 1 06 01 28 19	Sinkronisasi Program Pembangunan Nasional dan Daerah	tersusunnya dokumen sinkronisasi prioritas nasional dan prioritas pemerintah daerah	Bappeda Kabupaten Pandeglang	2 Dokumen	40,000,000		2 Dokumen	45,000,000	
1 06 01 1 06 01 27 03	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kabupaten Pandeglang 2014	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 dokumen	50,000,000		1 dokumen	60,000,000	
1 06 01 1 06 01 31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparat Perencana				120,000,000			130,000,000	
1 06 01 1 06 01 31 01	Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencana	Terselenggaranya Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Bappeda Kabupaten Pandeglang	5 orang	45,000,000		8 orang	50,000,000	
1 06 01 1 06 01 31 02	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab, Pandeglang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Kegiatan	75,000,000		1 Kegiatan	80,000,000	
1 06 01 1 06 01 32	Program Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				1,810,000,000			1,855,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 01	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	terselenggaranya koordinasi perencanaan pemangunan bidang ekonomi	Bappeda Kabupaten Pandeglang	10 x rapat koordinasi	75,000,000		10 x rapat koordinasi	75,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 02	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang sosial Budaya	Bappeda Kabupaten Pandeglang	8 dok/rapat	150,000,000		8 dok/rapat	150,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 03	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Bidang Fisik Prasarana	Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Bappeda kabupaten pandeglang	5 x rapat/ 1 Dokumen	140,000,000		5 x rapat/ 1 Dokumen	145,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Program Penganggaran Penelitian Pengembangan dan Statistik P4S	Tersusunnya koordinasi perencanaan pembangunan Tingkat Kabupaten dan terverifikasinya renstra SKPD	Pandeglang dan luar daerah	4 Acara 2 Dokumen	120,000,000		4 Acara 2 Dokumen	140,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 06	Koordinasi irigasi partisipatif dan sanitasi	terselenggaranya rapat bulanan evaluasi kegiatan, tersedianya tenaga pendamping masyarakat	Bappeda Kabupaten Pandeglang	12 x rapat	190,000,000		12 x rapat	195,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 07	Perencanaan perumahan dan permukiman	terselenggaranya kegiatan yang menunjang program perencanaan perumahan dan permukiman	Bappeda Kabupaten Pandeglang	8 x rapat/ 1 Dokumen	150,000,000		8 x rapat/ 1 Dokumen	155,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 09	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Terlaksananya Koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Bappeda Kabupaten Pandeglang	6 rakor	125,000,000	Kelembagaan	6 rakor	125,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 11	Koordinasi KEK Pariwisata	Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian KEK Pariwisata	Bappeda Kabupaten Pandeglang	10 x rapat	255,000,000		10 x rapat	260,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 13	Penunjang Kegiatan KPDT	Terselenggaranya koordinasi perencanaan pelaksanaan dan evaluasi seluruh kegiatan P4DT di Kab. Pandeglang	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 x rapat Koordinasi	100,000,000		3 x rapat Koordinasi	100,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2013			Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2014		Instansi Pusat/ SKPD Provinsi Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBD (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 06 01 1 06 01 32 14	Penunjang P2KP Program Penganggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi/ Penunjang P2KP program Penganggulangan kemiskinan	Kec. Pandeglang dan Labuan	2 kecamatan	100,000,000		2	100,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 15	Koordinasi Pokja Penataan Ruang BKPRD	Terkoordinasinya perencanaan dan pengendalian BKPRD	Bappeda kabupaten pandeglang	10 x rapat/ Dokumen 1	150,000,000		10 x rapat/ 1 Dokumen	155,000,000	
1 06 01 1 06 01 32 16	Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Bappeda Kabupaten Pandeglang	4 keg	95,000,000	Kelembagaan	4 keg	95,000,000	
1 06 01 1 06 01 23 19	Koordinasi Penunjang kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak (KHPPIA)	Terlaksananya Koordinasi kelangsungan hidup perkembangan perlindungan ibu dan anak	Bappeda Kabupaten Pandeglang	4 keg	85,000,000		4 keg	85,000,000	
1 06 01 1 06 01 23 21	Koordinasi dan Evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terlaksananya rapat koordinasi dan Evaluasi IPM	Bappeda Kabupaten Pandeglang	4 keg	75,000,000	Kelembagaan	4 keg	75,000,000	
1 16	Penanaman Modal				75,000,000			75,000,000	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				75,000,000			75,000,000	
1 06 01 1 06 01 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				75,000,000			75,000,000	
1 06 01 1 06 01 15 12	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Terselenggaranya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bappeda Kabupaten Pandeglang	Booklet	75,000,000		Booklet	75,000,000	
1 23	Statistik				410,000,000			260,000,000	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				410,000,000			260,000,000	
1 06 01 1 06 01 15	Program Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah				140,000,000			160,000,000	
1 06 01 1 06 01 15 01	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Data Statistik Daerah	Tersusunnya data/ Informasi/ Statistik daerah Pandeglang dalam angka tahun 2013, laporan	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 Dokumen	120,000,000		3 Dokumen	140,000,000	
1 06 01 1 06 01 15 02	Pemeliharaan Jaringan Website	Peningkatan Kecepatan jaringan	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Paket	20,000,000		1 Paket	20,000,000	
1 06 01 1 06 01 27	Program Penelitian dan pengembangan Informasi IPTEK dan Pembangunan				270,000,000			100,000,000	
1 06 01 1 06 01 27 01	Koordinasi Penelitian dan Fasilitasi Pembentukan Dewan Riset Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan informasi Iptek dan Workshop/ Seminar Dokumen Rekomendasi Pembangunan Hasil dari DRD	Bappeda Kabupaten Pandeglang	3 Acara 3 Rekomendasi	90,000,000		3 Acara 3 Rekomendasi	100,000,000	
1 06 01 1 06 01 27 02	Grand Design Pengembangan Buffer Zone TNUK	Tersusunnya Grand Design Pengembangan Buffer Zone TNUK	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	100,000,000		-	-	
1 06 01 1 06 01 27 03	Studi Kelayakan AMP	Tersusunnya Studi Kelayakan AMP	Bappeda Kabupaten Pandeglang	1 Dokumen	80,000,000		-	-	